

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna
memperolehgelar sarjana

Oleh

**HIDAYATULLAH
NPM :
PRODI AKUNTANSI**



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)

BANDA ACEH

2022

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2 Masalah Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Skop Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	7
2.1.2 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8
2.1.3 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	10
2.2 Penerapan Sistem Akuntansi	11
2.2.1 Pengertian Penerapan Sistem Akuntansi.....	11
2.2.2 Karakteristik Penerapan Sistem Akuntansi	14
2.2.3 Indikator Penerapan Sistem Akuntansi	14
2.3 Sistem Pengendalian Intern	15
2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	15
2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern	17
2.3.3 Indikator Sistem Pengendalian Intern	18
2.4 Penelitian Terdahulu.....	19
2.5 Kerangka Konseptual.....	20
2.6 Hipotesis Penelitian	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.2 Metode Penarikan Sampel	27
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Operasional Variabel	29

3.5 Metode Analisis Data	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil penelitian	38
4.1.1 Analisis Data Hasil Penelitian	38
4.1.2 Karakteristik Responden	38
4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas	40
4.2.1 Pengujian Validitas	40
4.2.2 Pengujian Reliabilitas	42
4.3 Analisis Deskriptif	42
4.3.1 Persepsi Responden terhadap Penerapan Sistem Akuntansi (X1)	43
4.3.2 Persepsi Responden terhadap Sistem Pengendalian Intern (X2)	45
4.3.3 Persepsi Responden terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	46
4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	48
4.4.1 Hasil Pengujian Normalitas	48
4.4.2 Hasil Pengujian Multikolinieritas	49
4.4.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	49
4.5 Hasil Uji Hipotesis	50
4.5.1 Hasil Pengujian Secara Simultan	50
4.5.2 Hasil Pengujian Secara Parsial	51
4.6 Koefisien Korelasi dan Determinasi	53
4.7 Pembahasan	53
4.7.1 Pengaruh Penerapan system Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	53
4.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	55
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
 DAFTAR PERPUSTAKAAN	 60

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dalam mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebahagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya sebagai manusia yang lemah dan tidak luput dari kesalahan serta kekhilafan khususnya dalam penulisan skripsi ini yang mungkin disana-sini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka pada tempatnya Penulis mengharapkan masukan ataupun kritikan yang membangun dari para ilmuwan dan atau pihak lainnya atas skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan ilmu Akuntansi khusus tentang Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dan penerapan SAP terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada waktu yang akan datang.

Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Banta Karollah SE, M.S. M selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di STIES Banda Aceh.
2. Ibu Intan Novia Astuti, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh

3. Ibu Eliana, SE, M.Si selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen STIES Banda Aceh, yang tanpa pamrih dan sepenuh hati telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada kami selama mengikuti perkuliahan dan bimbingan skripsi ini.
6. Kedua orang Tua yang sangat dicintai yang selama ini telah memberikan dukungan, bantuan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Disamping itu, juga kepada keluarga saya yang tercinta yang penuh kesabaran telah memberikan dukungan dan perhatian yang cukup besar dalam penyelesaian perkuliahan di STIES Banda Aceh.
7. Semua teman-teman tercinta yang secara aktif telah memberikan dukungan dan bantuan sehari-hari selama perkuliahan dan bimbingan skripsi di Kampus STIES Banda Aceh. Atas bantuan yang telah diberikan, semoga ALLAH S.W.T melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, *Amiin ya rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis

HIDAYATULLAH

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel III.1	Daftar Populasi.....	25
Tabel III.2	Skala Likert	29
Tabel III.3	Operasional Variabel.....	31
Tabel IV.1	Karakteristik Responden.....	39
Tabel IV.2	Hasil Uji Validitas	41
Tabel IV.3	Hasil Uji Reliabilitas.....	42
Tabel IV.4	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Penerapan Sistem Akuntansi (X1).....	43
Tabel IV.5	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern (X2).....	45
Tabel IV.6	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). 47	
Tabel IV.7	Hasil Pengujian Multikolinearitas	49
Tabel IV.8	Hasil Uji F (Simultan)	51
Tabel IV.9	Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen)	52
Tabel IV.10	Nilai Koefisien Determinasi	53

**DAFTAR
GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	19
Gambar IV 1 Normal Probability Plot.....	48
Gambar IV.2 Grafik ScatterPlot	50

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN ACEH BESAR

Oleh

HIDAYATULLAH
NPM :

Pembimbing

1. **Pembimbing I** **Eliana, SE, M.Si**
2. **Pembimbing II**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan system akuntansi dan system pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan maupun parsial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Model analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah 58 orang yang merupakan pegawai yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data Primer, dengan pengolahan data menggunakan software SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan system akuntansi dan system pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar. Secara parsial penerapan system akuntansi dan system pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar. Dilihat dari hasil koefisien determinasi sebesar 0,664 yang artinya variabel akuntansi kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh penerapan system akuntansi dan system pengendalian intern sebesar 66,4% sedangkan 33,6% pengaruhnya dijelaskan oleh variabel lainnya

Kata Kunci : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Permasalahan

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan. Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja, dan melaporkannya sebagai organisasi sektor publik. Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan, berkenaan dengan hal tersebut maka penciptaan akuntabilitas harus dilaksanakan dalam instansi pemerintah daerah untuk dapat menciptakan good governance. Pemerintah daerah dituntut memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas (Septiana, 2020).

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan transparan menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Lembaga Admistrasi Negara, 2003 dalam Afrina, 2015). Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam beberapa penelitian, untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut antara lain, sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern.

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dengan adanya sistem akuntansi pemerintah daerah, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikarenakan tujuan dari sistem ini adalah sebagai sarana untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan itu nanti pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalannya. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Fatmala (2014) dan Bowta (2013) dalam Afrina (2015) yang menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017) bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa dengan adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pengendalian intern juga diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada perundang-undangan (Nugraha, 2018). Dengan adanya sistem pengendalian intern dalam suatu lingkungan pemerintahan maka diharapkan akan semakin terciptanya lingkungan yang kondusif, efektif, dan efisien. Tentunya hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zodia (2015) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020. Pemeriksaan ini ditunjukkan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar dengan melihat adanya keterlibatan faktor-faktor diatas yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di Indonesia sendiri kegiatan pelayanan pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kabupaten Aceh Besar kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari pemerintah Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan yang kesembilan kali secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terima sejak tahun 2015, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ada beberapa temuan atau permasalahan yang perlu dapat perhatian yaitu : 1) pembayaran honorarium PNS pada Sembilan SKPK membebani keuangan Daerah; 2) terdapat kekurangan volume pada Sembilan pekerjaan pembagunan dan pemeliharaan jalan pada Dinas PUPR; dan 3) pekerjaan pengadaan masker pada Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi tidak sesuai dengan ketentuan. (<http://dpkkd.acehbesarkab.go.id/?p=1206>).

Kelemahan-kelemahan yang ditemukan BPK tersebut perlu segera Bupati Aceh Besar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, sehingga permasalahan yang terjadi tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi dari BPK.

<https://bappeda.acehbesarkab.go.id/?p=153>

Berdasarkan rangkaian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah sebelumnya, maka dirumuskan

pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.
2. Apakah Penerapan system Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui Penerapan system Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Perangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Perangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern semakin luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi SKPD Kabupaten Aceh Besar diharapkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Skop Penelitian

Penelitian ini mengambil skop bidang ilmu akuntansi sektor publik, dengan analisis menggunakan metode analisis kuantitatif. Dengan skop penelitian terfokus pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, yang lebih menitik beratkan pada pengaruh Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jln. Prof. A. Madjid Ibrahim, No 4 Kota Jantho, Aceh Besar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Permasalahan

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan. Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja, dan melaporkannya sebagai organisasi sektor publik. Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan, berkenaan dengan hal tersebut maka penciptaan akuntabilitas harus dilaksanakan dalam instansi pemerintah daerah untuk dapat menciptakan good governance. Pemerintah daerah dituntut memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas (Septiana, 2020).

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan transparan menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Lembaga Administrasi Negara, 2003 dalam Afrina, 2015). Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam beberapa penelitian, untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut antara lain, sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern.

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dengan adanya sistem akuntansi pemerintah daerah, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikarenakan tujuan dari sistem ini adalah sebagai sarana untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan itu nanti pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalannya. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Fatmala (2014) dan Bowta (2013) dalam Afrina (2015) yang menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017) bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa dengan adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pengendalian intern juga diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada perundang-undangan (Nugraha, 2018). Dengan adanya sistem pengendalian intern dalam suatu lingkungan pemerintahan maka diharapkan akan semakin terciptanya lingkungan yang kondusif, efektif, dan efisien. Tentunya hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zodia (2015) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020. Pemeriksaan ini ditunjukkan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar dengan melihat adanya keterlibatan faktor-faktor diatas yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di Indonesia sendiri kegiatan pelayanan pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kabupaten Aceh Besar kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari pemerintah Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan yang kesembilan kali secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terima sejak tahun 2015, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ada beberapa temuan atau permasalahan yang perlu dapat perhatian yaitu : 1) pembayaran honorarium PNS pada Sembilan SKPK membebani keuangan Daerah; 2) terdapat kekurangan volume pada Sembilan pekerjaan pembagunan dan pemeliharaan jalan pada Dinas PUPR; dan 3) pekerjaan pengadaan masker pada Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi tidak sesuai dengan ketentuan. (<http://dpkkd.acehbesarkab.go.id/?p=1206>).

Kelemahan-kelemahan yang ditemukan BPK tersebut perlu segera Bupati Aceh Besar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, sehingga permasalahan yang terjadi tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi dari BPK.

<https://bappeda.acehbesarkab.go.id/?p=153>

Berdasarkan rangkaian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah sebelumnya, maka dirumuskan

pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.
2. Apakah Penerapan system Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui Penerapan system Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Perangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Perangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern semakin luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi SKPD Kabupaten Aceh Besar diharapkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Skop Penelitian

Penelitian ini mengambil skop bidang ilmu akuntansi sektor publik, dengan analisis menggunakan metode analisis kuantitatif. Dengan skop penelitian terfokus pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, yang lebih menitik beratkan pada pengaruh Penerapan system Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jln. Prof. A. Madjid Ibrahim, No 4

Kota Jantho, Aceh Besar

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Adisasmita. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Arens, Alvin. A, Randal J. Elder, Mark S. (2014). *Auditing and Assurance service*. Edisi kedua belas. Jilid Satu. Jakarta : Erlangga. Prentice Hall International. New York.
- Bastian, Indra. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga . Jakarta: Erlangga
- Boynton, William C, Johnson N. Raymond. (2010). *Modern Auditing*. Edisi Delapan. Hoboken. JohnWiley & Sons.
- Darmawan (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Islam Indoensia
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ghozali, Imam. (2013). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS Versi 5.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2010). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasibuan, Jenny Rahmi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Padang Lawas). Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan
- Hall, A. James. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Keempat, Buku Satu, Diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani dan Deny Armos, Salemba Empat, Jakarta

- Hendri, Meisy & Erin. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2, No 1, Seri E, Februari 2020, Hal 2479-2493
- Horngren, Harrison. (2010). *Akuntansi*. PT Indeks Kelompok Gramedia
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2013) *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Malhotra, Naresh K. (2010). *Riset Pemasaran (Marketing Research)* (Edisi 4 Jilid 1). New Jersey, Indonesia: PT. Indeks
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maksyur, Noprial Valenra. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM. FEKON Vol. 2 No. 2 OKTOBER*
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi.
- Morissan, (2012), *Metode Penelitian Survey*, PT. Kencana, Jakarta
- Moheriono. (2012). “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mustafa. (2011). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*, (Doctoral dissertation, UNS).
- Mutimah. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada Satua Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah). Skripsi Universitas Satya Negera Indonesia Jakarta
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.

- Nazir, Moh (2010), *Desain penelitian*, Cetakan ke dua, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Notoatmojo, Soekidjo. (2013). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia
- Noerdiawan, Deddi. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurillah, A. S. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi emipiris pada SKPD kota depok)*.
- Nugraeni & Budiataru. (2015). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja*. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- Rachmawati, Ike Kusdiyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Ramon, Dolly. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat)*. *Artikel Universitas Negeri Padang*.
- Reyhan, M.Hafiz. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Propinsi Sumatera Utara)*. *Skripsi. Universitas Sumatera Utara*.
- Risianti. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Universitas Negeri Semarang. UNNES.
- Robbins, Stephen P., (2016), *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1 dan 2* Dialihbahasakan Oleh Sugiono , Prenhallindo, Jakarta
- Romney Marshall and Steinbart. (2012), *Accounting Information System (12th Edition)*. London: Prentice Hall
- Roshanti, A., Sujana, E., & Sinarwati, K. (2014). *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha , Volume 2 No: 1*.
- Ruri, W. (2013). *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah daerah (studi kasus pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung)*.

- R. Terry, George dan Leslie, W. Rue, (2010), *Dasar – Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sanjaya, Achdar. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kab. Soppeng), *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*
- Sehfuddin. (2011), *Manajemen Keuangan Pemerintah*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, Bagian Kedua* Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. (2014). *Research Method For Business A Skill Building Approach (5th Edition)* United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd.
- Sella, Esha Selvia Ayu. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan). *Skripsi Universitas Islam Malang*
- Septiana, Putri Invia. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Klaten). *Skripsi Universitas Widya Dharma Klaten*
- Simanjuntak. (2010). *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: fakultas Ekonomi
- Susanto, azhar. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Penerbit: Lingga Jaya, Bandung.
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.
- Tussakdiyah, Nurhasanah. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Ogan Ilir). *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Ubaidah, Tsaniya. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen). *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Zulharman, Khodri. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2*

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (X2)